

TESIS

**KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN TIDAK HORMAT
(STUDI DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
CABANG PAYAKUMBUH)**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Strata 2
Megister Kenotariatan Pada Program Pasca Sarjana**



Diajukan Oleh :

ANGGI FITO JULIAND, S.H

1820123057

Pembimbing :

Dr. Sukanda Husin, S.H., LL.M

Dr. Yussy Adelina Mannas, .S.H., M.H

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

**KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN TIDAK HORMAT
(STUDI DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
CABANG PAYAKUMBUH)**

Anggi Fito Juliand, 1820123057, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Tahun 2021, 107 Halaman

ABSTRAK

Bank memiliki fungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, hal ini biasa disebut dengan kegiatan pinjam meminjam (kredit). Kredit yang diberikan oleh bank, dimaksudkan untuk memberikan penyediaan uang yang di dasarkan atas perjanjian kredit yang di lakukan antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak masyarakat sebagai debitur. Pihak kreditur dalam menyalurkan kreditnya biasanya memerlukan suatu jaminan atau agunan yang bertujuan agar debitur tersebut tidak akan melakukan wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi terhadap kreditur. Salah satu subjek dalam suatu masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil, karena terdapat suatu kebiasaan yang timbul di kalangan pegawai negeri yang mana mereka biasa menjaminkan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di berbagai bank, sedangkan jika terjadi wanprestasi seperti seorang PNS dipecat secara tidak hormat yang menimbulkan kehilangan kesanggupan dalam memenuhi prestasinya, maka bank harus segera mengambil tindakan melakukan sita jaminan hingga melaksanakan peledangan terhadap agunan tersebut. Padahal keberadaan dari SK PNS sebagai agunan itu sendiri tidak memiliki unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai jenis dari suatu jaminan. Rumusan masalah yang dibahas adalah pertama, kepastian hukum SK PNS bagi kreditur sebagai jaminan dalam perjanjian kredit ditinjau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, kedua bentuk perlindungan hukum bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS yang diberhentikan tidak hormat pada PT. Bank Perkereditan Daerah Sumatera Barat Cabang Payakumbuh. Kajian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan tujuan untuk mengetahui apakah law in the book (peraturan hukum yang bersifat umum) sudah sesuai dengan law in action (peristiwa konkret yang terjadi pada masyarakat). Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa dari segi ketentuan hukum tidak ada hal yang mengisyaratkan bertentangan dengan ketentuan hokum, semuanya dikembalikan pada mereka yang berjanji atas perjanjian kredit tersebut selama yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan peraturan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1338 Kuhperdata yg mengisyaratkan perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu Undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri. Namun dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS ini memiliki kemungkinan wanprestasi salah satunya dipecat secara tidak hormat, maka dari itu agar pihak kreditur aman maka dalam menyalurkan kredit kepada PNS harus di ikuti dengan jaminan yang memiliki sifat eksekutorial yang jelas sehingga terciptanya kredit yang tidak memiliki resiko bagi kreditur.

Kata kunci : Perjanjian Kredit, Jaminan SK PNS